

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek penelitian

3.1.1 Pengertian objek penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang perlu diteliti. Menurut (Sugiyono, metode penelitian, 2017:39) objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek dalam penelitian ini adalah kecanggihan teknologi informasi (X_1), pengendalian internal (X_2), serta pengaruhnya terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi (Y) yang dilakukan pada salah satu instansi pemerintahan di Kota Bandung, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat (PEMPROV).

3.1.2 Gambaran umum perusahaan

a. Sejarah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data sejarah (Staatsblad Nomor 378 tanggal 14 Agustus 1925), Provinsi Jawa Barat Tingkat I merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Hindia Belanda. Pembentukan Provinsi Jawa Barat tersebut, nama resminya West Java Provinsi bagi kalangan Belanda atau formal pemerintah kolonial Hindia Belanda dan Pasundan bagi kalangan orang bumi putera, dimaksudkan untuk melaksanakan janji pemerintah kerajaan Belanda tahun 1901 yang memberikan hak otonomi kepada pemerintah Indonesia. Tahun-tahun berikutnya baru dibentuk Provinsi Jawa Timur (Oost Java Provinsi).

Meskipun demikian, hal itu bukan berarti bahwa pemerintahan di daerah Jawa Barat baru di mulai sejak tahun 1925 dan sebelumnya belum pernah ada pemerintahan. Kenyataan lain menunjukkan, jauh sebelum tahun tersebut di daerah Jawa Barat telah tumbuh dan berkembang suatu pemerintahan tertentu walaupun bentuk, sistem, dan strukturnya berlainan dengan tingkat Provinsi. Paling tidak sejak abad ke-5 di Jawa Barat telah tumbuh suatu pemerintahan yang teratur, yaitu berbentuk kerajaan. Kerajaan dimaksud bernama Tarumanagara dan salah seorang rajanya adalah Purnawarman. sudah barang tentu bentuk pemerintahan demikian tidak terwujud sekali jadi, melainkan melalui proses yang tidak sebentar.

Menurut sumber, pemerintahan berbentuk kerajaan muncul pada abad ke-2 Masehi, yaitu pemerintahan Kerajaan Salakanagara dengan ibukotanya Rajatapura dan pendirinya Dawawarman.

Dari data sejarah tersebut maka pemerintah menerbitkan Undangundang Tahun 1950 Nomor 11 meliputi : Karesidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan dan Cirebon. Meskipun demikian, hal itu bukan berarti bahwa pemerintahan di daerah Jawa Barat baru dimulai sejak tahun 1925 dan sebelumnya belum pernah ada pemerintahan, Sejak masa kerajaan Tarumanagara hingga lahirnya Provinsi Jawa Barat, di daerah Jawa Barat tiada henti-hentinya berlangsung suatu pemerintahan yang teratur namun bentuk, struktur dan sistem pemerintahan serta pusat pemerintahan dan pemegang kekuasaan mengalami perubahan dan pergantian juga perkembangan.

Adapun sistem dan struktur pemerintahan kabupaten-kabupaten di priangan (sejak abad ke-17) serta di banten dan cirebon (sejak abad ke-19) dipengaruhi pula oleh konsep pemerintahan Jawa dari zaman Mataram dan konsep pemerintahan Barat yang dibawa oleh orang belanda dan orang inggris.

Jika bentuk pemerintahan di Jawa Barat sejak zaman Kerajaan Tarumanagara hingga Kerajaan Sunda umumnya cenderung berpusat pada satu pemerintahan pusat, tetapi pada masa Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, hingga masa kompeni terbagi atas lebih dari satu pusat pemerintahan.

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda terdapat dualisme sistem pemerintahan di daerah Jawa Barat, yaitu antara sistem pemerintahan kolonial yang berdasarkan konsep Barat yang berlaku untuk orang-orang Eropa dan hubungan mereka dengan penguasa-penguasa pribumi (bupati) dengan sistem pemerintahan tradisional yang berdasarkan konsep yang tumbuh dalam masyarakat pribumi sendiri serta berlaku dari Kabupaten ke bawah.

Lokasi pusat pemerintahan mengalami beberapa kali perpindahan, sesuai dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempengaruhinya dan terjadinya peristiwa dan timbulnya suasana pemerintahan. Sedangkan pemegang kekuasaan berganti-ganti secara individual dan dinasti seiring dengan masalah usia manusia (pergantian generasi) dan perubahan politik, ekonomi, sosial, agama, dan sebagainya.

Gubernur Jendral H. W. Deandels merupakan penguasa kolonial pertama yang mengeluarkan peraturan tertulis mengenai Pemerintahan di Jawa Barat (1809), sedangkan sebelumnya pemerintahan kolonial diatur hanya berdasarkan kebijakan-kebijakan para pejabat kolonial setempat. Baru pada tahun 1854 dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebuah undang-undang yang berlaku umum yang dinamai Regeringsreglement (RR).

Pada tahun 1906 dibentuk Gementee (sekarang kotamadya) di enam buah kota di daerah Jawa Barat (Batavia, Meester Cornelis, Buitenzorg, Sukabumi, Bandung, dan Cherebon) yang merupakan pemerintah daerah otonom pertama di Indonesia, walaupun fungsinya baru kepentingan orang-orang Eropa setempat.

Sekitar 19 tahun kemudian barulah dibentuk daerah otonom yang lebih luas yang meliputi seluruh daerah Jawa Barat (dulu Jakarta dan Jatinegara masuk dalam wilayah pemerintahan Jawa Barat) dalam bentuk Provinsi. Pada masa itu pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat berada di Jakarta dan kepala daerahnya disebut gubernur yang selalu dipegang oleh orang Belanda.

Pada masa itu pula lahir Lembaga Legeslatif secara formal dalam struktur pemerintah daerah yang sekarang dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga Legeslatif daerah dimaksud adalah Gemeenteraad bagi tingkat Gemeente, Regentschapsraad bagi tingkat Kabupaten, dan Provincieraad bagi tingkat Provinsi.

Anggota legeslatif daerah Jawa Barat (seperti juga di daerah-daerah lainnya dan di pusat atau Volksraad) di domonasi oleh orang Belanda, baru kemudian dalam jumlah kecil terapat anggota dari kalangan orang pribumi (Indonesia) dan orang Timur Asing (Cina, India, dan Arab).

Ketua Lembaga Legeslatif tersebut ditempati oleh kepala daerah yakni Burgemeester (Walikota) pada tingkat Gemeente, Bupati pada tingkat Kabupaten, Gubernur pada tingkat Provinsi. sebagian anggota Lembaga Legeslatif daerah itu dipilih oleh rakyat tertentu (tidak semua rakyat dewasa mempunyai hak pilih), sebagian lagi diangkat oleh pemerintah daerah setempat. Pada masa pendudukan militer Jepang (1942-1945) pemerintah daerah tingkat Provinsi ditiadakan. Yang ada hanyalah pemerintah daerah tingkat karesidenan (Shu) kebawah, yaitu Kotamadya (Si), Kabupaten (Ken), Kewadanan (Gun), Kecamatan (Son), dan Desa (Ku). Kiranya hal itu dimungkinkan, karena terlebih dahulu wilayah Indonesia dibagi atas tiga daerah pemerintahan yang masing-masing dipimpin oleh suatu kesatuan militer. Sesudah Indonesia merdeka (1945) pemerintah daerah tingkat provinsi diadakan lagi. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945. Menurut keputusan tersebut wilayah Republik Indonesia dibagi atas 8 daerah administrasi pemerintahan berupa provinsi yang salah satu diantaranya ialah Provinsi Jawa Barat.

Ibukota Provinsi Jawa Barat pada mulanya tetap di Jakarta, namun karena kemudian di Jakarta terjadi kekacauan sesudah kedatangan tentara

Belanda di bawah NICA (Netherland Indie Civil Administration), pimpinan dan pemerintahan Republik Indonesia meninggalkan kota tersebut, maka ibukota provinsi Jawa Barat pun di pindahkan ke Kota Bandung (awal tahun 1946). Sejak waktu itu hingga sekarang ibukota Provinsi Jawa Barat tetap berkedudukan di Kota Bandung.

Selama masa Republik Indonesia yang telah berjalan lebih dari 47 tahun telah banyak terjadi peristiwa dan perubahan suasana di dalam pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan di daerah Jawa Barat. Pada tahun 1956 daerah ibukota RI Jakarta dipisahkan dari daerah administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Barat, karena dibentuk Daerah Istimewa Jakarta dan kemudian menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kedudukannya setingkat provinsi. Beberapa undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, telah dilahirkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pemerintahan daerah itu. Beberapa ujian berat telah dialami pula oleh pemerintah Daerah Jawa Barat beserta warganya. Dewasa ini, sejak lahirnya Orde Baru (1966), Pemerintahan Daerah Jawa Barat beserta seluruh warganya tengah berupaya keras melaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan rakyat, dengan titik berat pada bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jawa Barat dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Provinsi Jawa Barat, sejak berdirinya sampai sekarang telah dipimpin oleh 15 orang Gubernur, yaitu :

1. Mas Sutardjo Kartohadikusumo (1945-1945).
2. Mr. Datuk Djamin (1945-1945).
3. Murdjani (1946-1947)
4. R. Mas Sewaka (1947-1948) dan (1950-1951).
5. Ukar Bratakusumah (1948-1950).
6. Sanusi Hardjadinata (1951-1956).
7. R.Ipik Gandamana (1956-1960).
8. H. Mashidu (1960-1970).
9. Solihin GP (1970-1975).
10. H.Aang Kunaefi (1975-1985).
11. HR.Yogie SM (1985-1993).
12. R.Nuriana (1993-2003).
13. H.Danny Setiawan dan Nu'man Abdul Hakim (2003 – 2008).
14. Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (2008-2013).
15. Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar (2013-2018).
16. Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (2018-sekarang).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari unsur Sekretariat Daerah (Setda) yang meliputi : Sekertaris daerah dan Assisten-Assisten : Pemerintahan, Perekonomian, Adminsitasi dan Kesejahteraan Sosial serta biro-biro yang seluruhnya 13 biro ; 20 Dinas ; 16 Badan ; 1 Kas Daerah 1 Kantor Perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jakarta.

Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Periklanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa barat, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan dan Indagro.

b. Visi Misi Provinsi Jawa Barat

1) Visi

Terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif).

2) Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, disusun misi sebagai langkah pelaksanaan visi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain :

- a) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa.
- b) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.

- c) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah.
- d) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

C. Logo dan arti Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Gambar 3.1

Logo Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sumber : <https://jabarprov.go.id/>

Arti logo Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu :

- 1) Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat, berasal dari bentuk perisai sebagai bentuk penjagaan diri.

- 2) Padi melambangkan bahan makan pokok masyarakat Jawa Barat. Untaian padi tersebut terdiri atas 17 butir gabah, melambangkan tanggal hari kemerdekaan Republik Indonesia.
- 3) Kujang merupakan alat serba guna yang selama ini dianggap senjata khas masyarakat Sunda. Pada salah satu sisi kujang tersebut, terdapat lima buah lubang yang melambangkan lima dasar negara, yaitu Pancasila.
- 4) Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
- 5) Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
- 6) Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
- 7) Dam atau bendungan melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris.
- 8) Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengadakan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tanggal 29 Desember 2016. BPKAD PEMPROV Jawa Barat ini dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa pembentukan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat berupa badan Tipe A yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan aset tetap atau juga disebut dengan barang milik daerah (BMD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat (16), barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Struktur Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Kepala subbagian perencanaan dan pelaporan
 - b. Kepala subbagian keuangan dan aset
 - c. Kepala subbagian kepegawaian dan umum
3. Kepala bidang perencanaan anggaran daerah :
 - a. Kepala subbidang perencanaan anggaran daerah I
 - b. Kepala subbidang perencanaan anggaran daerah II

- c. Kepala subbidang perencanaan anggaran daerah III
- 4. Kepala bidang perbendaharaan daerah :
 - a. Kepala subbagian perbendaharaan daerah I
 - b. Kepala subbagian perbendaharaan daerah II
 - c. Kepala subbagian perbendaharaan daerah III
- 5. Kepala bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah :
 - a. Kepala subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah I
 - b. Kepala subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah II
 - c. Kepala subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah III
- 6. Kepala bidang pengelolaan barang milik daerah :
 - a. Kepala subbidang perencanaan kebutuhan
 - b. Kepala subbidang pendayagunaan
 - c. Kepala subbidang penatausahaan
- 7. Kepala unit pelaksanaan teknis daerah pengamanan dan pemanfaat aset :
 - a. Kepala seksi pengamanan aset
 - b. Kepala seksi pemanfaatan aset
 - c. Kepala subbagian tata usaha

3.2. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono, metode penelitian, 2017).

3.2.1 Metodologi yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019:23).

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Hal ini digunakan guna untuk mengetahui hubungan kualitas antara variabel melalui suatu pengujian dan perhitungan statistik.

Menurut Sugiyono, (2018:48) metode pendekatan deskriptif adalah sebagai berikut : “Metode Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Dalam penelitian maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.”

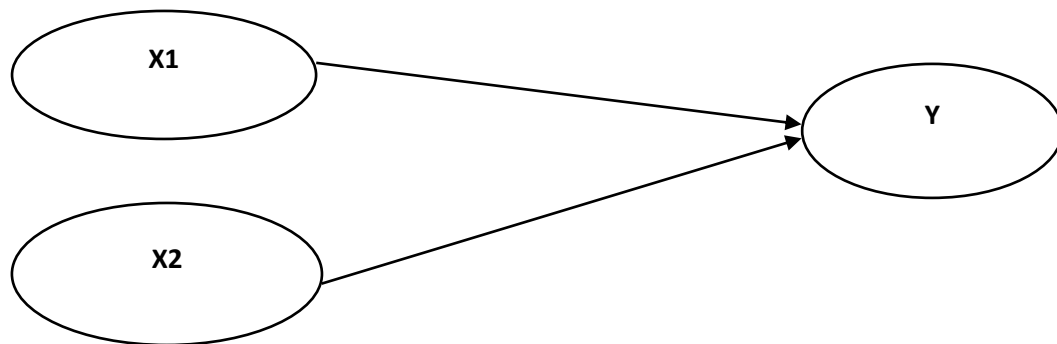
Metode pendekatan deskriptif digunakan oleh penulis sebagai alat untuk mengetahui gambaran mengenai kecanggihan teknologi informasi, pengendalian internal dan efektivitas sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Metode penelitian selanjutnya adalah metode pendekatan verifikatif. Menurut Moch. Nazir (2011:91) pengertian metode pendekatan verifikatif adalah sebagai berikut : “metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kausalitas

antara variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga dapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis diterima atau ditolak”.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan verifikatif digunakan oleh penulis sebagai alat untuk mengetahui pengaruh kecanggihan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi baik secara parsial maupun simultan.

Setiap model atau metode penelitian merupakan abstraksi dari kenyataan.kenyataan yang sedang diteliti (Sugiyono, Metode Penelitian, 2017). Dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diambil penulis, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2

Model Penelitian

Model penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian, sehingga mampu menjawab semua rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3.2.2 Operasionalisasi variabel penelitian

Menurut Sugiyono (2017:75) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh kecanggihan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi untuk menentukan operasional variabel dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu :

a. Variabel Bebas

Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau tumbuhnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2019:75). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kecanggihan Teknologi Informasi (X1), dengan indikatornya :

1. Perangkat Keras (*Hardware*)
2. Perangkat Lunak (*Software*)
3. Jaringan dan komunikasi
4. Database
5. Personalia Teknologi Informasi

Dan Pengendalian Internal (X2), dengan indikatornya :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

b. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:75). Variabel *devendent* dalam penelitian ini adalah efektivitas sistem informasi akuntansi (Y), dengan Indikatornya :

1. Akurat (*Accurate*)
2. Ketepatan Waktu (*Timelines*)
3. Keandalan (*Reliability*)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini adalah kecanggihan teknologi informasi dan pengendalian internal, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas sistem informasi akuntansi.

Operasional variabel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1

Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kecanggihan Teknologi Informasi (X1)	Kecanggihan Teknologi informasi terlihat ketika proses pengolahan data ke bentuk informasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, kemudian informasi tersebut mudah didapatkan, tingkat keakuratan informasi juga sangat tinggi. Dengan adanya teknologi informasi, tingkat	1. Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) 2. Perangkat Lunak Komputer (<i>Software</i>) 3. Jaringan dan Komunikasi 4. Database 5. Personalia Teknologi Informasi	Interval

	keterjangkauan informasi lebih dekat. Al Eqab & Adel (2013:12)		
Sistem Pengendalian Internal (X2)	Sistem pengendalian internal menyatakan bahwa “ sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern	Interval
Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (Y)	Sistem Informasi Akuntansi merupakan organisasi formulir, tulisan serta keterangan yang diselaraskan sedemikian rupa guna mengadakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen dalam rangka memberikan	1. Akurat (<i>accurate</i>) 2. Ketepatan Waktu (<i>timelines</i>) 3. Keandalan (<i>reliability</i>)	Interval

	kemudahan pengelola organisasi Mulyadi (2016:18)		
--	---	--	--

Sumber : Data diolah penulis, 2021

Dalam oprasional variabel skala Interval digunakan untuk memberikan informasi nilai pada jawaban. Setiap variabel penelitian diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner berskala Interval yang telah memenuhi pernyataan-pernyataan *skala likert's*.

Menurut (Asep Hermawan , 2005:132) Skala Likert merupakan skala yang mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap serangkaian pertanyaan berkaitan dengan keyakinan atau prilaku mengenai suatu obyek tertentu, Skala likert merupakan skala ordinal akan tetapi dalam penelitian-penelitian bisnis khususnya dalam pemasaran seringkali dimodifikasi dan diasumsikan sebagai skala interval.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Instrumen yang mengukur pengaruh kecanggihan teknologi informasi, pengendalian internal dan efektivitas sistem informasi akuntansi adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner dengan metode tertutup, dimana kemungkinan pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak memberikan alternatif jawaban lain.
2. Indikator-indikator untuk variabel-variabel diukur dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan ukuran tertentu yang telah ditetapkan pada jawaban alternatif dalam kuesioner. (Sugiyono,

2017:93) Mengatakan bahwa macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio.

Penelitian ini menggunakan pengukuran Skala Interval menurut (H. Djaali & Pudji Muljono : 27) adalah skala Interval menunjukkan tingkatan karakter individu dalam suatu variabel, Skala interval ini mendeskripsikan perbedaan jarak antara titik-titik angka tertentu dengan nilai interval yang sama untuk setiap angka karena menggunakan unit pengukuran yang konsisten, pengukuran interval meliputi penetapan angka pada obyek dengan cara tertentu sehingga perbedaan angka yang sama mewakili perbedaan yang sama pula dalam tingkatan atribut yang diukur.

Dalam operasional variabel ini, setiap variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat diukur oleh instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert's. Menurut (Sugiyono, 2016 : 93) menjelaskan bahwa :

“Skala *Likert's* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian”.

Selanjutnya, dari setiap jawaban diberikan skor, dimana skor akan menghasilkan skala pengukuran Interval. Untuk variabel X1

(Kecanggihan Teknologi Informasi), variabel X2 (Pengendalian Internal), dan variabel Y (Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi).

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:145).

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi (PEMPROV) Jawa Barat. Populasi tersebut dipilih karena peneliti menemukan ketidak sesuaian antara teori dan praktik yang terkait adanya aset hibah dari pemerintahan pusat yang masih banyak belum tercatat oleh BPKAD, dan Dana BOS yang kelebihan bayar yang disebabkan oleh validasi data tidak akurat. Hal ini mempunyai hubungan dengan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan efektivitas sistem informasi akuntansi. Adapun populasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Populasi penelitian

No	Nama Pemerintah Provinsi (PEMPROV)	jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	184

Sumber: <https://jabarprov.go.id/>

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena ada keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono, 2017:81).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pegawai pada bagian akuntansi, keuangan, dan para pengguna sistem informasi di Bdan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi (PEMPROV) Jawa Barat yang memenuhi kriteria tertentu.

Adapun sampel yang peneliti ambil dari BPKAD di Pemerintah Provinsi (PEMPROV) Jawa Barat, antara lain:

Tabel 3.3

Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Total Kuesioner yang di sebarakan	40
Kuesioner yang diterima/kembali	40

No	Nama Pemerintah Provinsi (PEMPROV)	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	40

	Daerah	
--	---------------	--

Sumber : <http://jabarprov.go.id/>

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat teknik sampling. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2016 : 82). Dalam probabilitas sampling ini terdapat beberapa teknik, yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive sampling* yang dimana teknik tersebut termasuk kedalam jenis teknik *non probability sampling*. Dalam buku Metode Penelitian oleh (Sugiyono 2016 : 85) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data skunder. Dilihat dari kebutuhan datanya, penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan data primer. Data primer

adalah data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya, sedangkan data skunder adalah data tidak diperoleh dari lapangan tetapi dari perpustakaan atau tempat lain yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah diuji validitasnya (Sugiyono, 2017). Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner yang dibagikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi (PEMPROV) Jawa Barat.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kuesioner ini akan dibagikan kepada responden yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bagian keuangan, akuntansi, dan pengguna sistem informasi akuntansi. Penulis memilih menggunakan teknik penelitian lapangan berupa kuesioner (angket). Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, 2016 : 142) menyatakan bahwa kuesioner (angket) adalah :

“Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya. kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.”

Jenis kuesioner yang digunakan oleh penulis adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya. Alasan penulis menggunakan kuesioner tertutup karena kuesioner jenis ini memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban dan juga memudahkan penulis saat melakukan analisis data terhadap seluruh kuesioner (angket) yang telah terkumpul.

Tabel 3.4

Skor Skala Likert's

No	Kriteria	Skor Item
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Netral (N)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

Sumber, Data Diolah, 2021

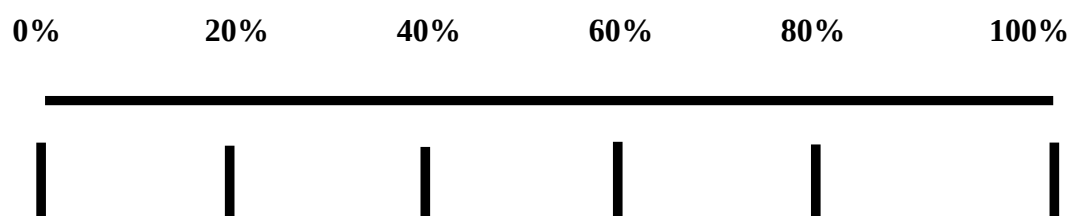
Jawaban responden kemudian dihitung berdasarkan rumus skor aktual dan dibandingkan dengan skor ideal untuk mendapatkan nilai presentase dari tanggapan responden. Skor aktual diperoleh melalui perhitungan seluruh jawaban responden sesuai bobot yang diberikan (1,2,3,4,5). Sedangkan skor ideal diperoleh melalui perolehan nilai tertinggi dikalikan jumlah responden. Persentase jawaban yang diperoleh menggunakan garis kontinum dan diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (100%) dan skor minimum (0%).

Tabel 3.5

Kriteria Interpretasi Skor Tanggapan Responden

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	0%-20%	Sangat Lemah
2	20%-40%	Lemah
3	40%-60%	Cukup
4	60%-80%	Kuat
5	80%-100%	Sangat Kuat

Sumber : Riduwan dan Kuncoro (2014:22)



Sangat Lemah Lemah Cukup Kuat Sangat

Gambar 3.3

Garis Kontinum

Sumber : Riduan dan Kuncoro (2014:22)

2. Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data dengan mengadakan tinjauan terhadap beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Maksud dari studi kepustakaan ini adalah agar peneliti mempunyai konsep yang jelas sebagai pegangan teori dalam pemecahan masalah, menunjang pengolahan data dan mendukung data-data dengan cara mencari dan menghimpun data serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan lingkup permasalahan yang diteliti.

3. Riset Internet (*Online Research*)

Pengumpulan data berasal dari situs resmi yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Memurut (Sugiyono, metode penelitian, 2016 : 147) analisis data adalah :

“Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul, kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden,

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan”.

3.7 Instrumen Penelitian

Data yang telah terkumpul oleh peneliti, selanjutnya dilakukan oleh pembobotan pada masing-masing variabel, maka variabel akan diuji terhadap instrumen yang akan dipakai dalam mengumpulkan data. Masing-masing variabel akan diuji dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang didapat dan dioalh peneliti memiliki mutu yang baik, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang akan dikemukakan terhadap hubungan-hubungan antara variabel dapat dipercaya, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil penelitian dapat diterima dengan baik. Instrumen yang baik akan menghasilkan data yang baik pula.

3.7.1 Uji Validitas

Menurut (Sugiyono, metode penelitian, 2016 : 125) menjelaskan bahwa uji validitas adalah instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (yang telah diukur) itu valid. Jika valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Atas dasar pendapat dari Sugiyono tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk dapat melanjutkan kegiatan penelitian serta mendapatkan hasil akhir yang valid dan reliable. Instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila alat ukur yang

digunakan untuk mendapatkan data dalam pengujian validitas dilakukan dengan menghubungkan korelasi antara skor tiap butir instrumen dengan skor totalnya.

Untuk menentukan suatu item layak digunakan atau tidak adalah dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05. Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (Kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang digunakan peneliti untuk diukur. Adapun rumus person *product moment* yang digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Rumus 3.2 *Product Moment Pearson*

Keterangan :

- r = Koefisien Korelasi (Validitas)
- X = Variabel Bebas
- Y = Variabel Terikat
- XY = Skor pada subyek item n dikalikan skor total
- N = Jumlah Yang Diteliti

jika koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka dinyatakan bahwa butir pertanyaan tersebut valid atau sah. Sebaliknya jika bernilai negatif, atau positif namun lebih kecil dari r tabel, maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Pengujian ini dilakukan dengan program *SPSS versi 25* dan menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- a. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$, maka instrumen atau soal dalam pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- b. Jika $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$, maka instrumen atau soal dalam pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor totalnya lebih besar dari $r \text{ tabel}$, maka item pernyataan tersebut dikatakan valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan tingkat kepercayaan dari hasil suatu pengukuran.

Tujuan uji reliabilitas adalah untuk menilai kesetabilan dan ukuran konsistensi resp

-onden dalam menjawab butir pertanyaan dalam kuesioner.

Uji reliabilitas merupakan tingkat kepercayaan dari hasil suatu pengukuran. Tujuan uji reliabilitas adalah untuk menilai kesetabilan dan ukuran konsistensi responden dalam menjawab butir pertanyaan dalam kuesioner.

Menurut (Ghozali, 2018) uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari suatu variabel kuesioner dapat dikatakan reliable adalah jawaban yang konsisten dari responden.

Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach'S* Alpha, yaitu dengan bantuan program *SPSS v 25*. Adapun langkah-langkah dalam pengujian ini yaitu :

1. Merumuskan hipotesis
 - a. H_0 : Pernyataan tidak realible
 - b. H_1 : Pernyataan reliable
2. Menentukan kriteria uji
 - a. Jika *Cronbach's Alpha* < 0.70 H_0 ditolak
 - b. Jika *Cronbach's Alpha* $> 0,70$ H_1 diterima
3. Menarik kesimpulan

Tabel 3.6

Nilai Tingkat Realibilitas

Alpha	Tingkat Realibilitas
0,00-0,20	Tingkat Realible
0,201-0,40	Kurang Realible
0,401-0,60	Cukup Realible
0,601-0,80	Reliable
0,80-1.00	Sangat Reliable

Sumber : Data diolah, 2021

3.8 Uji Asumsi Klasik

Berikut ini yang termasuk dalam uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji Multikolinearitas.

1) Uji Normalitas

Menurut (Ghazali, 2019 : 130), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati visual. Oleh sebab itu, uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test (K-s). Dengan ketentuan :

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : Data terdistribusi secara normal

H_1 : Data tidak terdistribusi secara normal

2. Menentukan kriteria pengujian

Dalam uji normalitas, peneliti menggunakan Sig dibagian Kolmogorov-Smirnov Test dengan dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

- a. Angka signifikansi uji Kolmogrov-Smirnov Test Sig $\geq 0,05$ menunjukkan data berdistribusi normal
- b. Angka signifikansi uji Kolmogrov-Smirnov Test Sig $\leq 0,05$ menunjukkan data tidak berdistribusi normal
- c. Menarik Kesimpulan

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain (Ghazali, 2018). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas artinya model regresi lolos uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3) Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dilakukan dengan melihat berbagai informasi sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis

H₀ : tidak dapat multikolinearitas

H1: terdapat multikolinearitas

2. Menentukan kriteria uji

Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 maka menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Maka regresi yang baik yaitu tidak terdapat masalah multikolinearitas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel bebas lainnya.

3.9 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.9.1 Rancangan Analisis

Untuk mengetahui pengaruh kecanggihan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang beroperasi di Provinsi Jawa Barat, data-data yang berkaitan dengan variabel tersebut dikumpulkan dan diolah. Setelah itu dilakukan teknik pengujian dengan menggunakan perangkat lunak *Statistic Program Social Science* (SPSS) Versi 25 for windows. Sebelum melakukan uji hipotesis, model yang baik harus memenuhi beberapa asumsi. Adapun penjelasan mengenai alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017), mengungkapkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2017), data kuantitatif adalah data yang diperoleh melalui pertanyaan terstruktur.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Usep Sudrajat dan suwaji 2018:59), analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun rumus linier berganda menurut Cooper (2014:147) sebagai berikut :

Rumus : Regresi Linier Berganda

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Efektivitas sistem informasi akuntansi
- β_0 = Konstanta, nilai Y pada saat semua variabel X bernilai 0.
- β_1 = Koefisien regresi kecanggihan teknologi informasi
- β_2 = Koefisien regresi pengendalian internal
- X_1 = Kecanggihan teknologi informasi
- X_2 = Pengendalian internal

ϵ = Suku kesalahan, berdistribusi normal dengan rata-rata 0.

Untuk tujuan perhitungan, ϵ diasumsikan 0.

3. Analisis Koefisien Korelasi Parsial

Peneliti menggunakan analisis koefisien korelasi Parsial, karena untuk mengetahui hubungan antara variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Peneliti menggunakan korelasi *pearson product moment*, karena data berbentuk *interval*.

Pengukuran *pearson product moment* ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25. Dari koefisien yang dihasilkan dapat diinterpretasikan korelasi antara kedua variabel yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi Parsial

Interval koefisien korelasi	Kekuatan hubungan
0,00 - 0,199	Sangat lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Cukup kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2017:231)

4. Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Sugiyono (2017:252) koefisien determinasi merupakan penguadratan dari nilai korelasi r-squared. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam presentase. Analisis koefisien detrmisasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam presentase.

Besarnya koefisien determinasi terletak antara 0 samapi dengan 100 atau antara 0% sampai 100%. Sebaliknya, jika koefisien determinasi = 0, model tersebut tidak menjelaskan sedikitpun pengaruh variabel X terhadap Y. Kecocokan model lebih baik jika koefisien determinasi semakin dekat dengan Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi (r^2). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Rumus Analisis Koefisien Determinasi

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien korelasi

3.9.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Anshori & Sri (2019 : 130) salah satu tujuan penelitian adalah untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis memiliki tujuan yaitu untuk menentukan apakah jawaban teoritas didukung oleh faktor yang dikumpulkan dan

dianalisis dalam proses pengujian data. Penelitian ini melakukan uji hipotesis untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan yang positif antara variabel kecanggihan teknologi informasi (X1) dan pengendalian internal (X2) dengan efektivitas sistem informasi akuntansi (Y).

Dengan hasil ini hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak terdapat hubungan yang positif antara variabel bebas dan variabel terikat, hipotesis alternatif (H_a) menyatakan terdapat hubungan yang positif antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.9.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji f adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan . pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh kecanggihan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi.

Menurut (Ghozali, 2018) Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$), artinya kemungkinan besar hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai profitabilitas 95% atas toleransi kesalahan 5%.

Menghitung nilai F_{hitung} untuk menghitung apakah koefisien korelasi dapat digeneralisasikan atau tidak berikut rumus uji signifikansi simultan (uji – F)

Rumus : Uji signifikan simultan

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

R = Koefesien Korelasi ganda

K = Jumlah Variabel Independen

N = Jumlah Anggota Sampel

Membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan:

- (a) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, kecanggihan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal (variabel independen) bersama-sama tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi (variabel dependen).
- (b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, kecanggihan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal (variabel independen) bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi (variabel dependen).

3.9.4 Uji Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Uji-t ini dilakukan dengan membandingkan antara t -statistik (nilai t yang dihasilkan dari proses regresi) dan nilai t yang diperoleh dari tabel.

Tingkat signifikan yang sering digunakan yaitu 5% atau 0,05 karena menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel cukup nyata. Tingkat signifikan 5% artinya kemungkinan besar 95% dari hasil penarikan kesimpulan menunjukkan kebenarannya atau memiliki toleransi kesalahan sebesar 5%. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut :

1) Menentukan hipotesis statistik

a. Untuk variabel kecanggihan teknologi informasi

$H_0: \rho_1 = 0$, artinya kecanggihan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi

$H_a: \rho_1 \neq 0$, artinya kecanggihan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi

b. Untuk variabel pengendalian internal

$H_0: \rho_2 = 0$, artinya pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi

$H_a: \rho_2 \neq 0$, artinya pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi

2) Menentukan pernyataan hipotesis

H_0 , artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)

H_a , artinya terdapat pengaruh positif antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y), maka:

a. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan pada variabel terikat.

b. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama merupakan variabel penjelas yang signifikan pada variabel terikat.

3) Dasar Pengambilan keputusan

Adapun kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka menolak H_0 dan menerima H_a .
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka menerima H_0 dan menolak H_a .

Untuk dapat mengetahui t_{hitung} maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-(k+1)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

r = Nilai korelasi parsial

Nilai t_{tabel} didapatkan dari :

$$Df = n - k - 1$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel independen